

Judul : Data BLSM Dipersoalkan
Tanggal : Selasa, 25 Juni 2013
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 5

Data BLSM Dipersoalkan

JAKARTA – Sejumlah anggota DPR mempertanyakan data penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011.

Pasalnya, banyak warga miskin yang justru tidak menerima dana kompensasi kenaikan harga BBM itu.

Anggota Komisi XI DPR Dolfie OFP mengatakan, BPS seharusnya bisa memberikan data penerima BLSM yang disebut-sebut sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) ke DPR, sehingga DPR bisa ikut mengawasi penyalurannya.

Penyaluran kartu perlindungan sosial (KPS) sebagai syarat pengambilan BLSM masih terkendala di lapangan. Sekitar 2000 KPS dikembalikan karena kartu-kartu itu ada kesalahan berupa alamat, perpindahan domisili, penulisan nama, dan penerima sudah meninggal.

"Data BPS kan independen, tetapi kenapa para anggota DPR minta data yang 15,5 juta penerima BLSM tidak diberikan, yang diberikan hanya pemerintah. Kan kalau kita tahu, kita bisa ikut awasi penyaluran BLSM tersebut," ujar Dolfie dalam Rapat Kerja antara pemerintah dan Komisi XI DPR di Senayan, Jakarta, kemarin.

Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah harus dapat memberikan data tersebut kepada DPR, sehingga tidak ada

"Data BPS kan independen, kenapa para anggota DPR minta data yang 15,5 juta penerima BLSM tidak diberikan."

DOLFIE OFP

Anggota Komisi XI DPR

anggapan bahwa BLSM tidak dipolitisasi oleh salah satu partai politik tertentu. "Saya dapat info di Sumedang, yang tercatat 350 RT tetapi yang dapat hanya 10 RT. Kita harus awasi itu, kita harus terbuka datanya, data kependudukan kita sempurna enggak? Kalau misalnya sempurna kita minta datanya. Jangan sampai ini ditutup-tutupi. Kalau memang benar tidak dipolitisasi sama partai tertentu, kami minta datanya dong," kata dia.

Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Andi ZA Dulung mengakui penyaluran KPS dan BLSM masih menemui kendala. KPS yang merupakan syarat pengambilan BLSM, kompensasi

kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih menggunakan data BPS per 2011.

Namun, ketidakakuratan data dalam pendistribusian KPS dan BLSM kepada masyarakat miskin tidak lebih dari 6%. "Tidak mungkin data akan sempurna 100%, tapi kami optimistis ketidakakuratan akan terus menurun karena pembauran data dilakukan setiap tiga tahun sekali," jelasnya.

Dia mengatakan pada awal 2014 akan dilakukan pendataan baru untuk data BPS, guna memperbarui penerimaan bantuan. Lanjut dia, saat ini kantor pos sebagai penyalur KPS dan BLSM menggunakan mekanisme di mana jika kartu tidak diterima langsung maka kartu akan kembali ke kantor pos hingga yang bersangkutan datang langsung untuk mengambilya.

Kepala Biro Informasi dan Persidangan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) Safri Burhanuddin mengakui penyaluran KPS dan BLSM masih menemui kendala. Namun, persoalan hanya terkait adanya warga miskin yang belum mendapatkan KPS.

Pemerintah, kata Safri, berusaha merampungkan persoalan KPS dalam pekan ini. Dari 15,5 juta keluarga miskin penerima BLSM, baru sekitar enam juta di antaranya yang sudah mendapatkan KPS. "Sementara sisanya akan kami kirimkan secara bertahap," ujarnya.

● **ayurachmaningtyas/esa maesaroh**